

**PERAN PEMERINTAH INDIA DALAM MENANGGAPI ISU PERIOD
POVERTY DI INDIA PADA TAHUN 2013-2023 DITINJAU DARI TEORI
FEMINISME LIBERAL KLASIK**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

PUTRI AMELIYA

20323095

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

**PERAN PEMERINTAH INDIA DALAM MENANGGAPI ISU PERIOD
POVERTY DI INDIA PADA TAHUN 2013-2023 DITINJAU DARI TEORI
FEMINISME LIBERAL KLASIK**

PROPOSAL SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

PUTRI AMELIYA

20323095

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN PEMERINTAH INDIA DALAM MENANGGAPI ISU PERIOD
POVERTY DI INDIA PADA TAHUN 2013-2023 DITINJAU DARI
TEORI FEMINISME LIBERAL KLASIK**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Pada Tanggal

26 Maret 2024

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Karina Ulami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.
- 2 Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D.
- 3 Rizki Dian Nursita, S.IP., M.H.I.

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Rabu, 13 Maret 2024,



Putri Ameliya

Surat Pernyataan Integritas Akademik

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Ameliya
Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 8 Juni 2002
Alamat : Kost Putri Pandan Wangi Gg. Karang, Besi, Sukoharjo,
Kabupaten Sleman, Ngaglik, DI Yogyakarta
NIM : 20323095
Program Studi : Hubungan Internasional (Reguler)

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa seluruh karya akademik yang saya hasilkan selama melaksanakan perkuliahan di Program Studi Hubungan Internasional adalah karya saya sendiri yang dikerjakan secara jujur dan independen dengan:

1. Tidak menggunakan jasa pihak ketiga (joki) dalam pengerjaan karya akademik atau menjadi pihak ketiga dalam pengerjaan karya akademik mahasiswa lain. Semua kontribusi yang telah diberikan oleh pihak lain dalam penulisan karya akademik saya telah sesuai dengan aturan dan tercantum dengan benar.
2. Tidak melakukan plagiasi yang berupa pengakuan atas hasil karya akademik orang lain. Segala gagasan atau data yang didapatkan dari karya atau pemikiran orang lain telah melalui proses parafrase dan dicantumkan pada sitasi.
3. Tidak melakukan manipulasi menggunakan kecerdasan buatan atau perangkat lunak otomatis lainnya untuk pengerjaan hal substansial dalam penulisan karya akademik.

Apabila di masa mendatang setelah kelulusan saya, ditemukan informasi yang membuktikan bahwa salah satu atau sebagian karya akademik saya tidak merupakan hasil kerja saya sendiri dan/atau merupakan pelanggaran atas pernyataan saya di atas, saya bersedia menerima konsekuensi yang berlaku sesuai dengan regulasi yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 13 Maret 2024



Putri Ameliya

DAFTAR ISI

	Halaman
PROPOSAL SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR SINGKATAN.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Cakupan Penelitian	6
1.5 Tinjauan Pustaka.....	7
1.6 Kerangka Pemikiran.....	10
1.7 Argumen Sementara.....	14
1.8 Metode Penelitian	15
1.8.1 Jenis Penelitian.....	15
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	15
1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....	15
1.8.4 Proses Penelitian	16
1.9 Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II PERIOD POVERTY DALAM KONTEKS SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI	18
2.1 <i>Period Poverty</i> dari Pandangan Sosial Budaya India	18
2.1.1 Kasta sebagai Sistem Implikasi dari Agama Hindu.....	18
2.1.2 Sistem Patriarki di India.....	23
2.2 <i>Period Poverty dalam Aspek Ekonomi India</i>	27
2.3 <i>Period Poverty dalam Aspek Pendidikan di India</i>	31
2.4 <i>Period Poverty dalam Aspek Infrastruktur di India</i>	33

BAB III ANALISIS PERAN PEMERINTAH INDIA DALAM MENGATASI PERIOD POVERTY DI INDIA	35
3.1 Period Poverty dan Ketidaksetaraan Gender di India	35
3.1.1 Ketidaksetaraan Gender sebagai Akar dari Period Poverty di India..	38
3.2 Teori Feminisme Liberal Klasik dalam Memandang Period Poverty di India.....	39
3.3 Peran dan Program Pemerintah India dalam Melindungi Hal-Hak Perempuan	40
3.3.1 Program Pemerintah India untuk Mengatasi Poverty di India.....	41
3.3.2 Program Pemerintah India untuk kesetaraan gender dalam aspek politik, ekonomi, pendidikan, dan sosial-budaya di India	44
3.4 Teori Feminisme Liberal Klasik dalam Memandang Peran Pemerintah India.....	45
BAB IV PENUTUP	50
4.1 Kesimpulan	50
4.2 Rekomendasi.....	51
DAFTAR PUSTAKA	52

DAFTAR SINGKATAN

COVID -19	: <i>Coronavirus disease</i>
ICESCR	: Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
MKM	: Manajemen Kebersihan dan Keseharan Menstruasi
MoSPI	: <i>Ministry of Statistics and Programme Implementation</i>
NHM	: <i>The National Health Mission</i>
NRHM	: <i>The national Rural Health Mission</i>
NUHM	: <i>The National Urban Health Mission</i>
PMBI	: <i>Pharmaceuticals & Medical Devices Berau of India</i>
PMBJP	: <i>Pradhan Mantri Bhartiya Janausadhi Pariyojana</i>
RMNCH+A	: Kesehatan Reproduksi-Maternal-Neonatal-Anak dan Remaja
TPAK	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
WEF	: <i>World Economic Forum</i>

ABSTRAK

Period Poverty dan ketidaksetaraan gender merupakan isu yang cukup krusial di India. Perempuan di India yang mengalami menstruasi cenderung tidak terpenuhi hak-haknya dan dibatasi kebebasannya. Faktor-faktor sosial budaya seperti kasta dan keyakinan agama serta ekonomi membuat para perempuan yang berada di pedesaan dan kalangan bawah semakin tertindas dan mengalami diskriminasi. Stigma yang buruk dan tabu membuat edukasi terkait menstruasi selalu dihindari sehingga para perempuan di India tidak mendapatkan cukup pengetahuan tentang menstruasi. Selain itu masa Pandemi Covid-19 juga memperburuk keadaan para perempuan yang kesulitan mengakses produk-produk kebersihan menstruasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah India dalam menangani isu *period poverty*, selama periode 2019-2023. Analisis ini berdasar pada teori Feminisme Liberal Klasik, dimana terdapat lima poin kunci yang nantinya menjadi fokus dari teori ini dalam menghilangkan ketidaksetaraan gender dan pembatasan kebebasan perempuan.

Kata Kunci: Pemerintah India, Kemiskinan Menstruasi, Ketidaksetaraan Gender, Teori Feminisme Liberal Klasik, Manajemen Kebersihan Menstruasi.

ABSTRACT

Period Poverty and gender inequality are quite crucial issues in India. Women in India who experience menstruation tend to have their rights denied and their freedoms restricted. Socio-cultural factors such as caste, religious beliefs and economics make women in rural areas and lower classes increasingly oppressed and experience discrimination. The bad stigma and taboo mean that education regarding menstruation is always avoided so that women in India do not get enough knowledge about menstruation. Apart from that, the Covid-19 pandemic has also worsened the situation for women who have difficulty accessing menstrual hygiene products. This research aims to analyze the role of the Indian government in dealing with the issue of period poverty, during the 2019-2023 period. This analysis is based on the theory of Classical Liberal Feminism, where there are five key points which will become the focus of this theory in eliminating gender inequality and restrictions on women's freedom

Keywords: *Indian Government, Period Poverty, Gender Inequality, Classical Liberal Feminist Theory, Menstrual Hygiene Management*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Period Poverty adalah dilema kesehatan masyarakat global yang telah lama diabaikan. Kondisi ini digambarkan sebagai kurangnya akses ke produk menstruasi, pendidikan, dan fasilitas sanitasi. Singkatnya, *period poverty* berarti bahwa jutaan perempuan mengalami ketidakadilan dan ketidakadilan karena menstruasi (Jaafar, Ismail, and Azzeri, 2023). Ketidaksetaraan gender, norma sosial yang diskriminatif, tabu budaya, kemiskinan dan kurangnya pelayanan dasar seperti toilet dan produk saniter semuanya dapat menyebabkan kebutuhan kesehatan dan kebersihan menstruasi tidak terpenuhi (UNICEF, 2023).

Menurut para aktivis feminis di India, perempuan India yang tidak mampu membeli produk menstruasi menggunakan alternatif yang tidak aman seperti "kain, jerami, pasir, dan abu", yang dapat menyebabkan infeksi. *Period Poverty* adalah masalah yang terus berlanjut di India karena stigma budaya seputar menstruasi (Srinivasan & Kannan, 2021). Banyak orang menganggap menstruasi sebagai topik tabu yang tidak boleh mereka bicarakan. Di India, penelitian menunjukkan bahwa 71% anak perempuan tidak memiliki "pengetahuan tentang menstruasi sebelum menstruasi pertama" (Dr. Ramesh H. Patil, 2021). Minimnya pengetahuan dan stigma seputar menstruasi menyebabkan satu dari setiap lima siswa perempuan putus sekolah begitu menstruasi dimulai. Selain itu, lebih dari 40% siswa perempuan di India memilih untuk tidak bersekolah selama siklus menstruasi mereka karena ketidakmampuan mengakses produk menstruasi untuk

mengelola menstruasi mereka dengan benar ditambah dengan stigma sosial yang dihadapi perempuan yang mengalami menstruasi di sekolah (Martin, 2022).

Salah satu masalah utama adalah kurangnya unit produksi produk sanitasi yang murah. Biaya dari pembalut terbilang cukup tinggi untuk wanita pedesaan karena biaya produksi yang juga tinggi (Sah, 2022). Seharusnya perempuan dijadikan pengusaha untuk memproduksi pembalut tersebut sendiri, namun tidak ada upaya yang dilakukan belum dibuat oleh pemerintah untuk membawa perubahan ini. Mempromosikan teknologi berbiaya rendah dengan berkaitan dengan produksi produk sanitasi akan mengarah pada peningkatan kebersihan menstruasi (Khurana & Kaur, 2018).

Diskriminasi terhadap perempuan yang mengalami menstruasi sangat luas di India, dimana menstruasi secara historis dipandang sebagai hal yang tabu dalam masyarakat, sehingga menimbulkan persepsi kenajisan yang diasosiasikan dengan individu yang sedang menstruasi (BBC, 2020). Salah satu hambatan terbesar untuk *period poverty* di India adalah akses kepada produk sanitasi terutama untuk wanita yang tinggal di daerah pedesaan (Sinha, 2022). Perempuan di pedesaan India cenderung menganggap bahwa produk sanitasi untuk menstruasi merupakan "*faltu kharcha*", atau pengeluaran yang tidak perlu (Gupta, 2021). Mereka lebih memilih untuk menggunakan potongan kain yang nantinya dicuci dan dikeringkan untuk digunakan secara berulang.

Masyarakat dan stigma budaya di India berpendapat bahwa menstruasi adalah hal yang tidak dapat diterima secara sosial. Karena dianggap tidak suci, wanita yang sedang menstruasi dikenakan pembatasan yang ketat dalam

kehidupan sehari-harinya. Namun, tantangan yang dihadapi sebagai perempuan di suku Gond dan Madia di Gadchiroli, yang merupakan salah satu daerah paling miskin dan terbelakang di India, sangatlah besar (Thakuri et al., 2021).

Sesuai dengan adat istiadat dan tradisi daerah tersebut, mereka diharuskan menghabiskan waktu lima hari di sebuah gubuk, yang sering kali letaknya tidak di dalam dusun dan di sekitar hutan (Narang, 2022). Wanita yang sedang haid tidak diperbolehkan memasak dan dilarang mengambil air dari sumur desa. Sebaliknya, para perempuan ini terpaksa bergantung pada makanan yang dibawa oleh kerabat perempuan lain yang tidak sedang menstruasi. Karena dianggap tidak suci, maka begitu laki-laki bersentuhan fisik dengan perempuan yang sedang haid, ia wajib membasuh dirinya. Mereka sering kali dilarang menghadiri pertemuan sosial dan keagamaan, tidak diberi akses ke tempat suci dan kuil, dan bahkan dilarang bekerja di dapur (Tripathi & Kumar, 2022).

Setidaknya 21 wanita yang meninggal saat tinggal di gubuk kurma karena alasan yang sama sekali tidak bisa dihindari. Laporan tersebut mendasari adanya instruksi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia India kepada pemerintah daerah agar meniadakan tradisi itu sebab dinilai sebagai "pelanggaran berat atas hak asasi perempuan atas keselamatan, kebersihan, dan martabat mereka." Akan tetapi, meski sudah bertahun-tahun berlalu, adat istiadat tersebut masih tetap dijalankan (Priti Jha & Niti Nagar, 2015). Para ibu-ibu di Tukum serta desa sekitar mengatakan bahwa mereka tidak berkeinginan menggunakan pondok menstruasi sebab merasa frustrasi dengan kurangnya fasilitas yang memadai. Di sisi lain, mereka mengakui bahwa mereka tidak mampu mengubah adat istiadat yang sudah

lama ada dan telah mengakar selama beberapa ratus tahun. Surekha Halami, salah satu perempuan yang mengalami *period poverty* di India mengungkapkan bahwa dia takut melanggar tradisi akan memicu murka para dewa, yang akan mengakibatkan penyakit dan kematian bagi keluarganya (Sarabu, 2022).

Menurut mitos tentang menstruasi yang ada di India, siapa pun yang melanggar tradisi harus membayar denda atau mengadakan pesta di seluruh desa yang mencakup daging babi atau kambing serta minuman. Masalah agama dan budaya terkadang disebut sebagai alasan utama untuk mendukung pembatasan; namun demikian, semakin banyak perempuan di wilayah metropolitan dan mereka yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi mempertanyakan pandangan terbelakang ini (Mitra, 2022). Beberapa organisasi hak-hak perempuan telah mengajukan tuntutan hukum dalam upaya memenangkan hak mengunjungi masjid dan kuil yang menganut agama Hindu. Kemudian, kampanye untuk menghilangkan konotasi negatif terkait menstruasi dilakukan di media sosial dengan menggunakan tagar seperti *#HappyToBleed* (BBC, 2021).

Fenomena *period poverty* ini juga dapat menimbulkan gangguan dan ketidaknyamanan pada fisik, mental, dan juga emosi. Beberapa penelitian menyatakan bahwa perempuan yang mengalami *period poverty* cenderung merasakan stress yang dapat berujung pada depresi (Mustafa et al., 2017). Selain itu, permasalahan kesehatan juga dapat timbul karena kurangnya akses kepada produk-produk menstruasi dan fasilitas kebersihan terkait menstruasi. Penyakit sistem urogenital seperti infeksi kandung kemih dan *vaginosis bacterial* dapat muncul. Fenomena ini pada akhirnya dapat menimbulkan stigma atau prasangka

yang menimbulkan rasa malu pada perempuan karena mengalami menstruasi dan membuat orang-orang tidak dapat membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan menstruasi secara bebas.

Terlepas dari semua situasi yang terjadi di India, hal-hal yang berkaitan dengan stigma menstruasi yang menimbulkan isu-isu gender lainnya merupakan suatu permasalahan yang masih tabu dan sulit untuk dijalankan (Ghosh, 2009). Segala hal yang berkaitan dengan kesehatan, kebersihan, kebebasan berekspresi, serta ruang bagi gender terutama bagi perempuan di India merupakan aspek yang perlu disoroti secara lebih lanjut dan signifikan.

Pada akhirnya, dampak yang timbul dari *period poverty* ini membawa efek yang lebih besar pada hidup perempuan seperti sulitnya mereka untuk berpartisipasi dalam pekerjaan mereka yang pada akhirnya dapat membuat perekonomian mereka dan keluarga terkena efeknya. Kemudian untuk aspek pendidikan yang pada akhirnya akan menimbulkan dampak dan konsekuensi jangka panjang kepada potensi diri mereka di masa depan.

Peran pemerintah India tentunya diperlukan untuk mengatasi permasalahan *period poverty* ini, berbagai program terkait dengan permasalahan kesehatan sistem reproduksi termasuk menstruasi pernah dijalankan oleh pemerintah India melalui berbagai departemen dan juga kementerian terkait. Melalui Program-program ini diantaranya adalah *Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram Councelling*, *Jan Ausadhi Suvudha Sanitary Napkins*, *National Rural Health Mission*, program edukasi di sekolah oleh tim medis *Rashtirya bal Swasthya Karyakram*, program kontrol anemia untuk anak perempuan. Selain itu,

untuk memberikan perlindungan kepada hak-hak perempuan dalam mengakses pendidikan, ekonomi, dan juga berpartisipasi dalam masyarakat serta untuk menyediakan lingkungan yang mendukung kesetaraan gender pemerintah India juga menjalankan kerjasama bersama UN Women untuk mengatasi kekerasan dan diskriminasi seksual, memberikan akses pendidikan, ekonomi, politik, dan juga sosial-budaya melakukan pengesahan komite dan amandemen hukum pidana terkait kekerasan seksual serta turut menjalankan konvensi CEDAW (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*).

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana teori feminisme liberal klasik meninjau peran pemerintah India dalam menangani *period poverty* di India?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Untuk menjelaskan bagaimana teori feminisme liberal klasik meninjau peran pemerintah India dalam menangani *period poverty* di India.
2. Untuk menjelaskan bagaimana peran pemerintah India dalam menangani *period poverty*.

1.4 Cakupan Penelitian

Periode waktu dalam penelitian ini adalah dari tahun 2013 hingga 2023, yakni dimana pemerintah India mulai menerbitkan dan menjalankan berbagai

kebijakan, undang-undang, serta program untuk mendukung perempuan yang mengalami menstruasi serta memberikan akses dan peluang kepada perempuan dalam bidang ekonomi, pendidikan, politik, dan juga sosial-budaya serta untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan, melindungi hak-hak perempuan, serta mendukung kesetaraan gender.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pada Jurnal yang berjudul "*Period Poverty*" oleh Sachika Khurana dan Preetkiran Kaur menjelaskan mengenai pandangan yang sangat umum di pedesaan India adalah perayaan publik atas kejadian pertama menstruasi yang ditandai dengan ritual dan perayaan. Namun, meskipun perayaan ini terbilang ramai, menstruasi tetap mengundang rasa malu, diam, dan menyendiri dari rutinitas sehari-hari. Produk menstruasi sekali pakai tidak tersedia secara umum dan kain menstruasi dalam bentuk kain lap, abu, dan sprei dipakai. Adanya takhayul dan juga karena buta huruf membuat wanita terpinggirkan dari informasi penting dan harus menempuh jarak sekitar 2 km untuk mendapatkan akses ke produk sanitasi. Menurut laporan, lebih dari 350 juta wanita di India mengalami menstruasi, namun masih sekitar 64%. Mereka tidak memiliki akses ke kebutuhan saniter. Kurangnya kesadaran dan tabu yang membuat menstruasi dinilai sebagai fase kotor dalam kehidupan perempuan telah membuat perempuan kehilangan akses yang layak kepada manajemen kebersihan menstruasi. Akses ke produk menstruasi menjadi lebih penting karena kurangnya kebersihan dan produk menstruasi menyebabkan masalah kesehatan utama (Khurana & Kaur, 2018).

Dalam Jurnal yang berjudul “*Period Poverty and Mental Health of Menstruators during COVID-19 Pandemic: Lessons and Implications for the Future*” yang ditulis oleh Aishwarya Rohatgi dan Sambit Dash memberikan penjelasan mengenai persediaan perlengkapan menstruasi yang tidak menentu memaksa banyak masyarakat kurang mampu menggunakan bahan-bahan yang tidak aman selama haid. Di daerah terpencil, keluarga yang menghadapi kesulitan ekonomi yang sangat besar tidak mampu mengeluarkan uang untuk membeli pembalut wanita di keluarganya (Kaur et al., 2018). Akibatnya, para perempuan terpaksa menggunakan alternatif buatan sendiri yang tidak bersih dan berbahaya seperti kain perca, daun kering, abu, pelapis, kapas, dan lumpur, yang kurang efektif dan berbahaya. Menggunakan alternatif tersebut menyebabkan infeksi saluran reproduksi dan penyakit yang dapat mengancam jiwa. Misalnya, di India, menurut data yang dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga, hanya 12% perempuan dan anak perempuan yang memiliki akses ke pembalut wanita (Batar, 2021). Pada saat yang sama, banyak yang bergantung pada metode konvensional yang tidak higienis selama menstruasi. Bagi perempuan yang tinggal di daerah kumuh dan padat serta bergantung pada toilet umum untuk sanitasi, pembatasan jarak sosial akibat COVID-19 membuat manajemen kesehatan dan kebersihan menstruasi menjadi tugas yang berat (Rohatgi & Dash, 2023).

Jurnal dengan judul “*Addressing Period Poverty Can Boost India’s GDP by 2.7%: Insights & Economic Implications*” oleh Tanya Narang menganalisis mengenai bagaimana *period poverty* mempengaruhi aspek penting lainnya dalam

masyarakat, terutama aspek ekonomi dan kesejahteraan sosial (Srivastava et al., 2022). Mengatasi *period poverty* tidak hanya menghasilkan keuntungan langsung dari peningkatan PDB India sebesar 2,7% tetapi juga menambah nilai yang signifikan terhadap PDB India selama masa hidup seorang yang mengalami menstruasi. Membantu para wanita mengelola menstruasi memungkinkan mereka untuk melanjutkan pendidikan dan tidak tertinggal karena itu memiliki efek pada masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, memastikan pendidikan menengah universal untuk anak perempuan, menghilangkan perkawinan anak, mengurangi kelahiran anak usia dini, mengurangi tingkat kesuburan di negara dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, dan meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan untuk perempuan dan mewujudkan kesejahteraan psikologis (Tedjo et al., 2021).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa di belahan dunia manapun *period poverty* merupakan hal yang krusial untuk diangkat ke dalam pembahasan hak asasi manusia di ruang lingkup internasional (Fitriani et al., 2019). Hal ini menyangkut kepada pembahasan mengenai menstruasi yang masih dianggap tabu dan memalukan, sehingga mempengaruhi berbagai aspek penting dalam kehidupan para perempuan. Terkhusus di India, dimana masyarakatnya masih memegang erat budaya dan memiliki penyebaran pendidikan yang masih kurang merata.

Kemudian, adapun perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah, penelitian yang penulis lakukan menyoroti peran dan aksi pemerintah India dalam menanggapi *period poverty* serta

memenuhi kesetaraan gender di India, rentang tahun yang penulis ambil dalam penelitian ini antara tahun 2013-2023, serta teori yang menjadi dasar terbentuknya kerangka pemikiran yang diangkat penulis berfokus pada akar dari teori Feminisme, yaitu Feminisme Liberal Klasik.

1.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teori Feminisme Liberal Klasik yang juga dipopulerkan oleh generasi pertama filsuf politik feminis yang mana diantaranya adalah Mary Wollstonecraft, Harriet Taylor Mill, dan John Stuart Mill (Taylor, 1992). Teori Feminisme Liberal Klasik ini digunakan untuk menggambarkan peran pemerintah negara India dalam mengatasi isu *period poverty* di India dengan menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan yang berujung kepada ketidaksetaraan gender. Teori Feminisme Liberal Klasik mempercayai bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama dalam kebebasan untuk menentukan hidup mereka. Liberalisme klasik sendiri berpendapat bahwa perempuan dan laki-laki berhak memperoleh hak-hak atas diri mereka sendiri dalam porsi yang sama dan setara (Batar, 2021). Oleh karena itu, negara berperan penting dalam mencegah dan melindungi hak-hak warga negaranya dari segala sesuatu yang bersifat memaksa dan membatasi kebebasan individu mereka. Para feminis liberal klasik juga meyakini harus adanya peran politik yang dapat membuat undang-undang atau kebijakan untuk memberikan hak-hak istimewa perempuan dan menguatkan kedudukan perempuan (Judul et al., 2021). Salah satu cara untuk

mengkarakterisasi kesalahan yang terjadi ketika negara gagal mengakui hak-hak perempuan adalah dengan kegagalan menghormati hak perempuan untuk diperlakukan setara dengan laki-laki, atau hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum (McElroy 1991a: 3). Teori feminisme liberal klasik ingin memperjuangkan kesetaraan gender dalam konteks pendidikan, kesempatan yang sama bagi hak sipil antara laki-laki dan perempuan, dan juga partisipasi ekonomi perempuan.

Mary Wollstonecraft, dalam bukunya *A Vindication of the Right of Women* menggambarkan masyarakat Eropa yang sedang mengalami kemunduran dimana perempuan dikekang didalam rumah tidak diberikan kesempatan untuk masuk dipasar tenaga kerja dan melakukan pekerjaan rumah tangga. Sedangkan laki-laki diberikan kebebasan untuk meembangkan diri seoptimal mungkin. Padahal kalau perempuan diberikan kesempatan yang sama juga bisa meembangkan diri secara optimal, asal perempuan juga diberikan pendidikan yang sama dengan pria.

Wollestone juga mengkritik *Emile*, novel karya Jean Jackques Rosseau yang membedakan pendidikan laki-laki dan perempuan. Pendidikan laki-laki lebih menekankan rasionalitas mempelajari ilmu alamiah, ilmu sosial dan humaniora-karena nantinya akan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga sedangkan pendidikan untuk perempuan lebih menekankan pada emosional -mempelajari puisi, dan seni karena perempuan akan menjadi istri yang penuh pengertian, responsif, perhatian dan keibuan. Jalan keluar yang ditawarkan Wollestone adalah mendidik perempuan sama dengan mendidik laki-laki dengan juga mengajarkan

perempuan soal rasionalitas sehingga perempuan mampu menjadi “diri sendiri” tidak menjadi “mainan laki-laki”.

Satu abad kemudian J. S. Mill dan Harriet Taylor Mill bergabung dengan Wollstonecraft. Yang menekankan pentingnya rasionalitas untuk perempuan. J S Mill dan harriet Taylor Mill lebih jauh menekankan agar persamaan perempuan dan laki-laki terwujud, tidak cukup diberikan pendidikan yang sama tetapi juga harus diberikan kesempatan untuk berperan dalam ekonomi dan dijamin hak sipilnya yang meliputi hak untuk berorganisasi, kebebasan untuk berpendapat, hak untuk memilih dan hak milik pribadi, serta hak-hak sipil lainnya.

Sumbangan lain pemikiran mereka berdua adalah dua-duanya menekankan pentingnya Pendidikan, Kemitraan dan Persamaan. Mill lebih menekankan pada pendidikan dan hak, sedangkan Taylor lebih menekankan kemitraan. Mill lebih jauh juga mempertanyakan superioritas laki-laki, menurutnya bahwa laki-laki itu tidak lebih superior secara intelektual dari perempuan. Pemikiran Mill yang juga menarik bahwa kebajikan yang ditempelkan pada perempuan seringkali merugikan perempuan karena perempuan tidak bisa menjadi diri sendiri, sebab ia akan menjadi orang yang dikehendaki masyarakat.

Feminis Liberal menginginkan terbebasnya perempuan dari peranan gender yang menindas perempuan. Mereka berargumentasi bahwa dalam masyarakat yang patriarki pekerjaan yang cocok untuk perempuan diasosiasikan pada sifat feminim seperti guru, perawat, sekretaris, kasir di bank dsb. Penentangan stereotipe tersebut harus melalui pendidikan androgini yang mempunyai dimensi laki dan perempuan, baik disekolah maupun di rumah.

Negara ikut bertanggung jawab untuk menjamin tidak ada lagi diskriminasi pada perempuan baik seksual maupun penghasilan dan menjamin perempuan terbebas dari pelecehan seksual, pemerkosaan dan kekerasan. Feminis Liberal sangat penting dalam pergerakan feminisme dengan perjuangannya untuk perempuan dibarat untuk meraih persamaan hak, peniadaan diskriminasi ditempat kerja dan perubahan hukum yang lebih menguntungkan perempuan (Association for Women in Small Business Assistance, 2012).

Pada penelitian ini, berdasarkan teori feminisme liberal klasik pemerintah India dianggap sebagai aktor penting untuk memastikan dan melindungi dan menjamin hak-hak perempuan sebagai individu terpenuhi, adanya hukum dan kebijakan yang menjamin kesetaraan gender, serta kesempatan perempuan untuk berpartisipasi di masyarakat tanpa memiliki batasan. Isu *period poverty* dipandang oleh teori Feminisme Liberal Klasik sebagai pelanggaran hak-hak perempuan dalam mengakses kebebasan dalam menempuh pendidikan, fasilitas kesehatan yang mana dalam konteks penelitian ini adalah alat-alat sanitasi untuk kebersihan menstruasi, dan juga kebebasan mereka dalam bersosialisasi dan memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat (Mariscal et al., 2019). Maka dari itu, teori Feminisme Klasikal Liberal akan menganalisis peran pemerintah India dalam membuat kebijakan untuk mengatasi isu *period poverty* serta mewujudkan kesetaraan gender dalam melindungi hak-hak perempuan di bidang ekonomi, politik, pendidikan, dan juga sosial-budaya.

1.7 Argumen Sementara

Period poverty di India merupakan sebuah isu yang cukup sulit untuk dihilangkan, dari tinjauan teori feminisme juga dapat dilihat bahwa perempuan masih sering mendapatkan diskriminasi atas hal-hal biologis yang secara lumrah terjadi pada mereka seperti menstruasi.

Diskriminasi dan ketimpangan ini selain mempengaruhi kemampuan perempuan untuk mengakses hak-hak dasar mereka, juga mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi di masyarakat secara universal. Menurut teori Feminisme Liberal Klasik, pemerintah India memiliki peran penting sebagai aktor yang menjamin serta hak-hak warga negaranya, terutama dalam konteks pendidikan, ekonomi, serta hak sipil tanpa mengesampingkan hak-hak individu.

Di samping itu, dengan adanya isu *period poverty* di India, juga berkaitan dengan ketidaksetaraan gender yang berimplikasi kepada berbagai lapisan struktural sosial budaya di India (Thakur, 2019). Pemerintah India sendiri telah menjalankan beberapa program bersama separtemen dalam negeri dan kementerian terkait juga organisasi internasional serta turut dalam konvensi internasional. Pemerintah India menunjukkan responsibilitas yang cukup baik dan tanggap dalam mengatasi diskriminasi perempuan, sehingga dapat membantu peningkatan kualitas hidup mereka.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif melalui studi literatur terhadap objek yang akan diteliti. Metode ini menguraikan ucapan, tulisan, bahkan perilaku dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau komunitas tertentu yang diamatinya dengan mendalam. Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif merupakan pengamatan pada fenomena dengan setting alami yang terjadi di dunia kemudian dipahami atau ditafsirkan dengan suatu teori, konsep, atau makna tertentu. Penelitian ini mencakup berbagai metode, seperti observasi, studi kasus, penyelidikan, metode audio-visual, dan analisis interpretative (Denzin & Lincoln, 2011).

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pemerintah India sebagai aktor yang nantinya akan memberikan solusi dan sikap atas permasalahan *period poverty* di India dan masyarakat India, terutama perempuan yang mengalami menstruasi. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah permasalahan *period poverty* di India serta isu sosial lainnya yang diakibatkan oleh *period poverty*.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian kualitatif ini, metode yang akan digunakan penulis dalam mengumpulkan data adalah melalui data sekunder atau dengan

melakukan studi literatur. Sumber data atau informasi dalam penelitian ini akan diperoleh dari buku, jurnal, laporan resmi pemerintah negara terkait, maupun artikel yang memiliki keterkaitan atau hubungan yang sama dengan topik penelitian ini.

1.8.4 Proses Penelitian

Dalam proses pengumpulan data, penulis akan melakukan proses analisis data. Sebelum melakukan analisis, penulis akan melakukan riset untuk mengumpulkan data atau informasi dari sumber sekunder seperti buku, jurnal, artikel, dan lainnya yang bersifat kredibel dan valid, Tahapan berikutnya adalah proses menganalisis data secara sistematis yang dimulai dengan menyusun data yang diperoleh dari studi literatur atau kajian pustaka agar lebih mudah dipahami, kemudian mengolah dan menelitinya hingga mendapatkan kesimpulan dari topik dan rumusan masalah yang diajukan penulis.

1.9 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis dalam memahami isi dan menguraikan pembahasan terkait adanya penelitian ini, maka penulisan penelitian akan disusun secara sistematis ke dalam empat bab, yakni dengan pembagian sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, dari topik penelitian yang dibahas, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi pembahasan yang menjelaskan mengenai kompleksitas masalah *period poverty* di India dan bagaimana *period poverty* dapat mempengaruhi berbagai aspek penting di India seperti pembangunan dan perekonomian.

Bab III berisi pembahasan mengenai analisis dari upaya dan peran pemerintah India dalam menangani *period poverty*. Dalam bab ini penulis akan menganalisis topik terkait dengan kerangka pemikiran yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni teori feminisme liberal klasik.

Bab IV berisi kesimpulan yang diambil dari poin-poin pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dalam penelitian ini, serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

PERIOD POVERTY DALAM KONTEKS SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI

2.1 *Period Poverty* dari Pandangan Sosial Budaya India

2.1.1 *Kasta sebagai Sistem Implikasi dari Agama Hindu*

Hambatan budaya masih menjadi salah satu hambatan terbesar di India dan masyarakat lainnya. Karena adanya unsur rasa malu yang dikaitkan dengan menstruasi, hal ini membuat pembahasan mengenai menstruasi perempuan seperti hal yang harus dihindari di India, dan dianggap sebagai hal yang membawa kesialan dan malapetaka bagi yang mengalaminya serta yang memiliki kontak langsung dengan perempuan yang sedang mengalami menstruasi (Bartlett, 2017). Menstruasi dalam pandangan budaya India dianggap merupakan hal yang kotor dan tidak suci, sehingga perempuan yang mengalami menstruasi seringkali diasingkan dari keluarganya atau bahkan dari kuil tempat mereka beribadah. Adat istiadat yang melekat secara turun temurun sulit untuk dihilangkan meskipun pemerintah India telah menerbitkan kebijakan terkait perlindungan hak-hak perempuan.

Gaokar di India adalah gubuk yang kumuh dan terpencil, tempat perempuan sering diasingkan saat menstruasi. Dalam beberapa kasus, praktik tersebut bahkan menyebabkan kematian. Beberapa pondokan ini

dapat ditemukan di Desa Sitatoli, sebuah desa terpencil di Distrik Gadchiroli, India (Changoiwala, 2018).

Tradisi ini berasal dari keyakinan umat Hindu mengenai *Vishvarupa* yang dibunuh oleh Dewa Indra. Hal ini Dewa Indra berusaha melakukan peringanan dosa dengan membuat empat elemen yaitu; sungai, pohon, tanah, dan perempuan. Dimana nantinya darah menstruasi dianggap sebagai bukti pengampunan dosa, sehingga perempuan yang sedang mengalami menstruasi dianggap tidak suci dan yang bersentuhan dengan mereka juga dianggap kotor.

Secara historis, hal yang merupakan faktor utama ialah sistem kasta di India, dimana masyarakatnya secara sosial dibedakan berdasarkan agama, kelas, suku, wilayah, gender, dan bahasa. Meskipun perbedaan tersebut maupun bentuk-bentuk perbedaan lainnya yang ada di masyarakat, hal ini akan menimbulkan permasalahan jika terjadi tumpang-tindih antar dimensi-dimensi serta dijadikan sebagai satu-satunya dasar pengklasifikasian sistematis dan tidak setaranya akses terhadap sumber daya berharga semisal pendapatan, kekayaan, kekuasaan, ataupun pendidikan. Penerapan sistem pengkastaan di India tergolong dalam sistem stratifikasi tertutup, artinya keturunan menentukan status sosial seorang individu. Sehingga adanya batasan interaksi sekaligus perilaku dengan individu lain yang berbeda kasta (Sekhon, 2000).

Pengklasifikasian kelompok masyarakat India dibagi dalam empat tingkatan hierarki kasta yang disebut *varna*. Masyarakat diklasifikasikan

berdasarkan pekerjaannya serta menentukan jalan terhadap kekayaan, kekuasaan, juga hak istimewa. Posisi pemimpin di masyarakat mayoritas diisi oleh kasta dominan (Pintane, 2010). Kasta bawah memiliki anggapan secara ritual lebih rendah dari dua kasta atas (Smith, 1994). Dimana urutan dari keempat kasta ini dari yang tertinggi adalah *Brahmana* yaitu umumnya merupakan pemuka agama dan juga cendikiawan, kemudian ada *Ksatria* yang umumnya merupakan para politikus dan juga tantara, di urutan ketiga ada *Vaishya* yang merupakan para pedagang, serta yang terakhir merupakan para buruh, pelayan, petani dan juga pengrajin. Dimana kasta terakhir ini sering dinilai sebagai kelompok masyarakat yang “tak terlihat” dan “tak tersentuh” oleh masyarakat lainnya.

Status perempuan secara signifikan masih terikat pada status laki-laki, namun pendidikan dan kesadaran akan kesetaraan bagi perempuan telah meluas dan menyebar ke seluruh India (Sekhon, 44). Di daerah pedesaan, gerakan di luar spesialisasi kasta yang berfokus untuk memperjuangkan kesempatan kerja dan akses terhadap sumber daya masih sulit dan lambat bagi masyarakat dari kasta yang lebih rendah, namun bagi masyarakat perkotaan, kasta kini menjadi bagian di kehidupan sehari-hari yang dianggap kurang penting. Meskipun sudah ada larangan diskriminasi berdasar kasta, namun kasta sudah dijadikan sarana dalam bersaing mendapatkan kekuasaan maupun sumber daya di India modern, misalnya pekerjaan baru, kesempatan pendidikan, ataupun menambah peluang hidup (Sekhon, 45). Tren tersebut

terkait dengan kebijakan preferensial India sekaligus implementasi kebijakan-kebijakan tersebut.

Termuat dalam *“Ein Unglück ist die Tochter”* (Sialnya Anak Perempuan), sebuah buku yang dikarang seorang ahli bernama Syed, menyatakan bahwasanya sejak dulu di India menganggap perempuan dimiliki oleh pria. Kebijaksanaan hanya ada dalam diri pria, tidak ada di perempuan, dan masih diterapkan dalam kehidupan masyarakat India. Perempuan tidak berhak mengembangkan identitas diri. Identitas yang melekat pada diri mereka ialah istri dan wadah memproduksi anak (Apriani 2015).

Peran penting dari adanya sistem kasta ini ditemukan dalam membangun pekerjaan juga peran serta nilai-nilai masyarakat India. Selama berabad-abad sistem stratifikasi tersebut mendapat dukungan dari agama, dimulai dari bangsa *Arya* lalu berlanjut hingga ke jalan panjang yang penuh musibah diskriminasi, segregasi, kekerasan, dan kesenjangan. Agama Hindu adalah tulang punggung kompleks polusi kemurnian, dan agama itulah yang memengaruhi kehidupan sehari-hari dan kepercayaan masyarakat India. Bahkan setelah enam puluh tiga tahun merdeka, masyarakat India masih secara sadar berada dalam cengkeraman kasta. Secara historis, India telah bertahan sebagai negara selama ribuan tahun dengan kelompok tertutup yang terbagi berdasarkan kasta, kepercayaan, dan bahasa (Velassery, 2005).

Meskipun secara perlahan India telah bergerak menuju kehidupan masyarakat yang terbebas dari ikatan kasta dalam mendapatkan kesempatan

hidup yang sama, sistem kasta ini telah menjadi kehidupan turun-temurun yang dijalani oleh masyarakat India. Tidak semua kalangan di India dapat merasakan kesetaraan yang sama, termasuk para perempuan. Para perempuan yang terlahir di pinggiran kota seperti desa-desa terpencil bisa dibidang masih kesulitan untuk mengakses kehidupan yang setara dengan laki-laki akibat diterapkannya sistem kasta ini secara berabad-abad lamanya.

Dalam konteks isu *period poverty* yang terjadi di India, sistem kasta memiliki dampak yang cukup signifikan atas terbatasnya akses para perempuan dari kelas kasta bawah untuk mengakses pendidikan yang membuat mereka minim akan pengetahuan mengenai menstruasi dan juga kesehatan reproduksi. Hal ini juga berkaitan dengan stigma dari keluarga dan orang-orang terdekat mereka, yang juga tidak mendapatkan pendidikan mengenai hal-hal berbau seksual, termasuk menstruasi. Dimana kebanyakan masyarakat India menganggap hal tersebut adalah hal yang tabu dan memalukan untuk dibicarakan. Sehingga mereka tidak mendapatkan dukungan psikologis selama mengalami menstruasi. Selain itu, sistem kasta yang membuat kesempatan kerja masyarakat kelas bawah juga membatasi kemampuan mereka dalam meningkatkan taraf hidup mereka sehingga mereka cenderung berada di kondisi ekonomi yang rentan dan tidak cukup stabil untuk mendapatkan akses ke alat-alat dan produk menstruasi yang aman dan nyaman. Semua permasalahan ini juga berkaitan kepada adanya ketidaksetaraan gender yang muncul dari berbagai aspek penting dalam kehidupan perempuan di India. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan harapan

teori feminisme liberal klasik yang menginginkan perempuan dipandang sebagai makhluk rasional dan memiliki potensi yang sama dengan laki-laki.

2.1.2 Sistem Patriarki di India

Sistem Patriarki adalah ialah praktik sosial maupun sistem struktur yang mana perempuan didominasi, ditindas, dan dieksploitasi laki-laki (Walby, 1990). Patriarki dibangun secara hierarkis dan melalui struktur yang tidak seimbang oleh hubungan kekuasaan di mana lelaki mengontrol produktivitas, reproduksi, maupun seksualitas perempuan. Dengan memaksakan stereotip karakter maskulin dan feminitas dalam masyarakat, mereka mempertahankan hubungan kekuasaan yang tidak adil antara pria dan wanita (Sah, 2022).

Di India kuno, wanita dihormati, dan kelahiran anak perempuan dianggap sebagai pertanda datangnya Lakshmi, Dewi kemakmuran dan kekayaan. Wanita disebut sebagai "*janani*", atau "nenek moyang", dan "*ardhanigini*" atau "separuh tubuh". Wanita juga dipandang sebagai perwujudan Dewi Durga. Sebelumnya, perempuan menghadapi banyak tantangan akibat sistem masyarakat patriarki yang didominasi laki-laki, ketaatan pada kepercayaan konvensional lama, dan sebagainya. Tanggung jawab perempuan memiliki batasan, berkisar dalam tanggung jawab tradisional yakni tugas-tugas seperti melahirkan anak dan membesarkan anak (Sah, 2022).

Sejarah India hingga saat ini didominasi oleh sistem patriarki. Tidak terkecuali abad ke-21. Itulah sebabnya kondisi sosial, ekonomi, politik, status budaya dan pendidikan perempuan bahkan telah terdegradasi di zaman modern. Menurut Bapak Bhide Patil, pekerja misionaris yang membantu menciptakan generasi reformis sosial di India dan Maharashtra. Terlepas dari beberapa hal dalam sejarah India dari periode Matriarkal, pada masa Inggris, terutama Raja Ram Mohan Roy, Mahatma Phule melakukan banyak pekerjaan dalam menjawab pertanyaan tentang perempuan pada abad kesembilan belas. Sekalipun pekerjaan mereka tidak cukup, tampaknya ada perubahan yang telah dimulai. Perkembangan perempuan di era modern bisa dibagi menjadi dua periode, satu periode pra-kemerdekaan dan periode lainnya pasca-kemerdekaan. Peran perempuan dalam masyarakat dapat dipahami dari kedua hal tersebut periode-periode ini. Abad ke-20 dan ke-21 sangat penting bagi masyarakat India. Periode ini benar-benar telah membawa banyak perubahan radikal dalam kehidupan wanita India. Selama periode ini, kepribadian wanita berubah, eksistensi sosial, budaya dan kekeluargaan perempuan pun ikut berubah berarti. Sikap masyarakat terhadap perempuan sedang dibentuk kembali.

Secara keseluruhan, perempuan dipandang dengan perasaan bahwa mereka lemah secara fisik, mental, dan ideologi. Ketidaksetaraan gender dalam konteks pernikahan tersebar luas. Dalam masyarakat tradisional, pernikahan dilakukan pada usia dini. Saat ini pernikahan anak perempuan ditentukan oleh orang tuanya. Dalam masyarakat tradisional, hanya laki-laki

yang berhak bercerai. Bahkan saat ini, meskipun undang-undang memberi perempuan hak untuk bercerai, namun tidak semua orang memanfaatkannya. Saat ini, masih banyak wanita yang hidup dalam ketertinggalan. Di dalam masyarakat India, perempuan ditindas atas nama budaya dan agama (H. Patil, 2021).

Pada saat ini kecenderungan perempuan menempati posisi inferior dalam berbagai aspek penting dalam kehidupan seperti kehidupan sosial, partisipasi politik, dan juga ekonomi masih sering ditemukan. Agama dan sistem budaya seringkali menjadi konteks yang memunculkan batasan-batasan tertentu pada setiap aspek kehidupan. Kebanyakan sistem budaya bersifat patriarki, dimana dapat ditemukan bahwa partisipasi laki-laki dalam wujud-wujud budaya itu sendiri lebih dominan dibandingkan perempuan. Dimana di India sendiri, kehidupan perempuan dibatasi dan diatur sedemikian rupa oleh budaya mereka. Hal-hal menyangkut reproduksi, jumlah kelahiran, dan juga hal biologis seperti menstruasi yang terjadi pada mereka harus diatur oleh sistem budaya. Sistem ini juga yang nantinya mengakibatkan kebanyakan perempuan di India, terutama mereka yang berada di kelas bawah cenderung masih tertinggal jauh di kehidupan sosial. Partisipasi perempuan cenderung terbatas karena sejak dahulu kala kemampuan mereka dinilai tidak sebanding dengan laki-laki. Perempuan yang harus mengalami menstruasi dan juga melahirkan dipandang lemah oleh masyarakat.

Apa yang terjadi kepada para perempuan di India merupakan bentuk patriarki yang menjerat kehidupan perempuan di sana atas hal biologis yang terjadi pada diri mereka seiring mereka beranjak dewasa. Budaya yang mengakar dan turun-temurun ini dinilai merampas hak hidup dan kebebasan perempuan India hingga berakibat pada kondisi psikologis yang dapat berakibat jangka panjang dan memiliki efek yang signifikan dalam keberlangsungan kehidupan mereka. Isu *period poverty* merupakan hal tabu yang sulit mendapatkan perhatian di India. Selain sulitnya akses perempuan kepada peralatan dan kebutuhan menstruasi, kurangnya kesadaran masyarakat dan pengetahuan menjadi aspek penting dari penyebab kurangnya perhatian terhadap isu ini serta menjadikan peran pemerintah kurang efektif.

Data terbaru menunjukkan sekitar 50% wanita di India masih menggunakan pakaian menstruasi saat menstruasi. Hanya sekitar 1,7% wanita yang menggunakan produk seperti tampon. Selain itu, penggunaan pembalut berbanding lurus dengan tingkat pendapatan keluarga. Di keluarga termiskin, hanya sekitar 53% perempuan yang menggunakan produk menstruasi yang higienis. Studi lain menunjukkan bahwa 71% anak perempuan di India tidak memiliki pengetahuan mengenai siklus menstruasi sebelum menstruasi pertama mereka. Banyak orang di pedesaan India tidak menerapkan kebersihan pada saat menstruasi yang baik. Hal ini menjadi tantangan karena kurangnya toilet, produk menstruasi, dan air yang layak. 15.000 sekolah negeri di negara ini tidak memiliki toilet, menurut statistik

resmi. Masalah yang dihadapi banyak remaja yang mengalami menstruasi diperparah dengan kurangnya fasilitas sanitasi (Smile Foundation, 2023).

2.2 Period Poverty dalam Aspek Ekonomi India

Period poverty merupakan isu yang kompleks apabila dilihat lebih dalam lagi, terutama dari aspek ekonomi. Di India sendiri tingkat perempuan yang mengalami *period poverty* sendiri terbilang cukup tinggi dengan angka 71%, dimana apabila dibiarkan dan tidak segera diatasi maka angka ini akan terus meningkat dan mempengaruhi kondisi perekonomian India. Pengaruh *period poverty* terhadap aspek ekonomi di India dapat terlihat secara signifikan melalui kurang memadainya akses terhadap perlengkapan menstruasi, sehingga ketika perempuan mengalami menstruasi hak dan kewajiban hidup mereka yang harusnya terpenuhi juga menjadi terhambat. Seperti ketika perempuan India mengalami menstruasi dan tidak bisa mengakses perlengkapan menstruasi saat menempuh pendidikan maka akan ada kemungkinan mereka tidak bisa bersekolah selama beberapa waktu untuk menghindari rasa malu dan sakit yang dialami semasa menstruasi. Hal ini akan berakibat kualitas pendidikan mereka yang mana nantinya dapat berpengaruh pada peluang kerja serta kriteria kerja di masa depan. Masalah kesehatan yang serius pada sistem reproduksi juga dapat timbul akibat pemakaian alat yang tidak higienis semasa menstruasi, hal ini nantinya juga berdampak kepada meningkatnya biaya perawatan kesehatan.

Partisipasi kerja perempuan juga pasti akan menurun karena produktivitas mereka yang juga cenderung menurun pada saat menstruasi. Tidak adanya kesetaraan gender dan dampak psikologis lainnya juga dinilai menurunkan produktivitas perempuan akibat kurangnya akses kepada perlengkapan menstruasi serta tekanan sosial yang mereka terima karena menstruasi merupakan hal yang tabu di India.

India telah naik delapan peringkat dalam Laporan Kesenjangan Gender tahunan tahun 2023, dan menempati posisi 127 dari 146 negara, dari peringkat 135 pada tahun lalu. Namun peningkatan statistik ini, yang menutup 64,3% kesenjangan gender secara keseluruhan, bukanlah hal yang patut digembirakan. Berdasarkan empat indeks penanda utama yaitu peluang dan partisipasi ekonomi, pemberdayaan politik, juga pencapaian kesehatan, pendidikan, serta keberlangsungan hidup, India memiliki peluang untuk meningkatkan diri dalam masing-masing aspek sehingga setengah dari negara yang jumlah penduduknya paling banyak di dunia dapat berkontribusi atas pembangunan, perekonomian, pertumbuhan, maupun kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Partisipasi ekonomi dan kesenjangan peluang mengalami penurunan sebesar 3% dibandingkan tahun 2020, sementara dalam hal pencapaian pendidikan, India berada di posisi ke-114. Kesenjangan gender di India telah melebar menjadi 62,5%, sebagian besar disebabkan oleh kurangnya keterwakilan perempuan dalam politik, peran teknis dan kepemimpinan, penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, layanan kesehatan yang buruk, rendahnya rasio melek huruf perempuan dibandingkan laki-laki, dan kesenjangan

pendapatan. Pandemi ini hanya memperlambat kemajuan yang dicapai India dalam mencapai kesetaraan gender. Negara ini perlu segera fokus pada “kesehatan dan kelangsungan hidup” yang mengarah pada rasio jenis kelamin yang tidak seimbang karena tingginya praktik pemilihan jenis kelamin berbasis gender dan partisipasi ekonomi perempuan. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dan porsi perempuan dalam peran teknis telah meningkat. menurun pada tahun 2020, mengurangi perkiraan pendapatan yang diperoleh perempuan, yaitu seperlima dari laki-laki.

Di India, dari total 30% masyarakat yang termasuk dalam taraf ekonomi di bawah garis kemiskinan, yang mana 70 % adalah perempuan. Kemiskinan perempuan di India berhubungan langsung dengan tidak tersedianya peluang otonomi juga ekonomi, minimnya jalan menuju sumber daya ekonomi berupa warisan, kepemilikan tanah, ataupun kredit, minimnya akses terhadap pendidikan juga layanan dukungan, serta sedikit keterlibatan selama proses pengambilan keputusan. Situasi perempuan di bidang ekonomi juga tidak lebih baik, dan laki-laki masih menerima keuntungan lebih banyak. Dengan alasan tersebut, kemiskinan merupakan akar dari diskriminasi gender dalam masyarakat patriarki dan ketergantungan ekonomi pada laki-laki juga merupakan penyebab kesenjangan gender. (Sarabu, 2022).

Temuan pada 2019 menyebut di atas 90% perempuan India mengerjakan tugas rumah tangga dengan tidak menerima bayaran, dibanding lelaki yang persentasenya sebesar 27%. Hasil lain menunjukkan 22% perempuan menunjukkan keterlibatan pada kegiatan serta pekerjaan terkait dari pada 71%

lelaki. Faktanya, temuan serupa juga ditemukan di sebagian negara bagian lainnya di India. Partisipasi perempuan di semua negara bagian dalam mengerjakan tugas rumah tangga tanpa dibayar persentasenya 84%, terlepas dari keterlibatan lelaki pada pekerjaan tersebut serta keterlibatan wanita pada kegiatan serta pekerjaan terkait. Informasi ini didapat dari Kantor Statistik Nasional yang mengadakan survei selama 2019 dari Januari sampai Desember. Informasi lain dilaporkan Oxfarm yang menyatakan terjadinya diskriminasi ialah faktor yang mendorong kecilnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK). Temuan lain yang selaras dikemukakan oleh *Ministry of Statistics and Programme Implementation* (MoSPI) India mencatatkan pada 2020-2021 TPAK perempuan India berada diangka 25,1% mencakup perempuan di desa dan kota (MoSPI, 2022). Ditemukan adanya penurunan drastis dibanding 2004-2005. Hal tersebut diakibatkan dari maraknya PHK serta ditariknya wanita dari angkatan kerja, namun selama periode tersebut ekonomi India mengalami pertumbuhan tergolong pesat (Oxfarm, 2019).

Dalam hal memberikan akses yang merata bagi pria dan wanita untuk terlibat juga peluang ekonomi, India berada di peringkat terbawah dengan paritas kurang dari 40%. Di satu sisi, terdapat peningkatan dalam kesetaraan upah dan pendapatan, namun jumlah perempuan yang menduduki posisi senior dan peran teknis mengalami penurunan. Kekhawatiran lainnya adalah kinerja India dalam bidang kesehatan dan kelangsungan hidup, meskipun peningkatan rasio jenis kelamin saat lahir telah meningkatkan kesetaraan setelah kemajuan yang lambat selama lebih dari satu dekade. Sangat penting bagi anak perempuan untuk

mendapatkan akses terhadap pendidikan di seluruh tingkat sekolah dan perguruan tinggi; dan mereka juga membutuhkan pekerjaan yang dibayar. Perempuan akhirnya melakukan begitu banyak pekerjaan tidak dibayar di rumah sehingga banyak yang tidak punya waktu atau tenaga untuk memilih pekerjaan dibayar. Jika pandemi ini menunjukkan betapa rapuhnya kehidupan, maka hal ini akan jauh lebih sulit bagi perempuan karena tingkat partisipasi kerja mereka menurun, sehingga mengurangi pendapatan rumah tangga. Seringkali, meskipun mereka mendapatkan pekerjaan, perempuan dibatasi oleh norma-norma patriarki dan budaya; selain itu, ada masalah keamanan yang serius. (Thehindu.com, 2023).

Pandangan yang dimiliki pemerintah India sebelum menginjak 2020 seringkali timpang dalam memandang figur gender. Mulai pada abad 20 awal, catatan sejarah menunjukkan adanya dominasi lelaki serta kentalnya budaya patriarki yang bisa banyak ditemukan pada bidang sosial maupun ekonomi (Bannerji 2016). Dasar dari pembentukan norma sosial yang dipakai India ialah sistem agama, kasta, ras, sampai gender yang membuat diskriminasi pada perempuan menjadi semakin kental, contohnya saja pada aspek kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi (Gorringe 2018).

2.3 Period Poverty dalam Aspek Pendidikan di India

Di India, perempuan mendapatkan kesempatan dan kewenangan yang lebih kecil dalam keamanan dari tindakan kriminal. Perempuan juga mendapatkan peluang yang terbatas kepada akses informasi publik. Hal ini juga mengakibatkan perempuan di India tidak dilibatkan dan tidak didengarkan pendapatnya dalam

pengambilan keputusan di dalam maupun di luar rumah. Selain itu perempuan juga mendapatkan kesempatan yang lebih kecil untuk mendapatkan pendidikan karena berbagai faktor seperti kemiskinan, angka buta huruf perempuan yang lebih tinggi, hingga adanya *period poverty*. Anak perempuan di India seringkali tidak mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak laki-laki, sehingga menyebabkan perbedaan besar dalam tingkat melek huruf antara laki-laki dan perempuan. Di India, 187 juta perempuan buta huruf, yang merupakan sepertiga dari seluruh penduduk buta huruf di dunia. Terdapat perbedaan sebesar 24 poin persentase dalam tingkat melek huruf antara laki-laki dan perempuan di India: sekitar 75% laki-laki melek huruf, sementara hanya 51% perempuan yang melek huruf (Naarisamata, 2023).

Berdasarkan data, Jharkhand dan Bihar menduduki peringkat terendah dalam indeks pendidikan dengan nilai masing-masing 0,22 dan 0,23. Artinya, kondisi pendidikan perempuan di India cukup memprihatinkan. Dari empat indikator pendidikan, Bihar dan Jharkhand berada pada kategori rendah di tiga indikator. Menurut data NFHS-5 angka melek huruf perempuan di Bihar adalah 55% dan hanya terdapat 28,8% perempuan yang telah bersekolah selama 10 tahun atau lebih. Rasio Pendaftaran Kotor Perempuan di Pendidikan Tinggi juga cukup buruk dengan hanya 13,1% perempuan yang bersekolah di lembaga pendidikan tinggi. Angka putus sekolah anak perempuan di tingkat sekolah dasar adalah 1,5. Tingkat melek huruf dan hasil pembelajaran paling rendah terdapat di negara bagian BIMARU (Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan dan Uttar Pradesh) (Balani, 2017). Hal ini juga ditemukan dalam hasil kami di mana negara-negara

bagian ini memiliki kinerja yang cukup buruk dalam indeks pendidikan yang memiliki nilai di bawah 0,45. Rajasthan memiliki kesenjangan gender melek huruf yang tinggi.

Pendidikan menjadi aspek yang penting untuk dipertimbangkan untuk mengatasi period poverty di India. Kurangnya kesempatan bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan mengakibatkan hidup perempuan terdampak dari segala hal seperti mereka kesulitan untuk mendapatkan edukasi dan informasi mengenai mengenai menstruasi juga kesehatan reproduksi, tidak memiliki kualifikasi yang cukup untuk mendapatkan pekerjaan dan posisi strategis di masyarakat, adanya kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan membuat perempuan menjadi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pribadi menyangkut menstruasi tanpa harus bergantung kepada laki-laki ataupun keluarga.

2.4 Period Poverty dalam Aspek Infrastruktur di India

Di negara-negara berpendapatan rendah, infrastruktur jarang dibangun dengan kebutuhan perempuan atau anak perempuan dalam pikiran. Ini penting karena ketika infrastruktur tidak memadai, kelompok termarginalisasi seperti wanita dan anak perempuan menderita konsekuensi dalam bentuk kesempatan ekonomi dan pendidikan yang hilang dan risiko bagi keselamatan dan kesejahteraan mereka. Dengan membuat infrastruktur yang tepat dapat membuat perbedaan. Dalam beberapa tahun terakhir, *World Bank Group* (WBG) dan Rencana Aksi Regional Gender Asia Selatan telah membimbing keterlibatan infrastruktur di Asia Selatan untuk lebih memenuhi kebutuhan perempuan dan anak perempuan dengan meningkatkan bakat manusia, meningkatkan peluang

ekonomi dan akses ke pekerjaan, meningkatkan suara dan representasi perempuan (Chen, 2022).

Di India sendiri, pembangunan infrastruktur dapat memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap ketidaksetaraan gender. Berbagai infrastruktur penting seperti jalan raya, jembatan, dan juga fasilitas-fasilitas umum lainnya dibangun dengan tidak memperhatikan kebutuhan perempuan dan anak. Sehingga tentunya diperlukan perbaikan dan inovasi dalam pembangunan infrastruktur di India, terutama jalan raya yang seringkali memiliki akses yang sulit sehingga berdampak kepada sulitnya perempuan mengakses layanan dan fasilitas kesehatan yang mana juga termasuk menstruasi serta menghambat perempuan untuk bekerja di luar rumah. Selain itu kurangnya layanan transportasi umum yang aman juga membahayakan dan menghambat mobilisasi perempuan. Hal ini juga sejalan dengan faktor terbesar terjadinya *period poverty* di India, yaitu kesulitan perempuan dalam mengakses produk-produk menstruasi yang aman dan higienis.

BAB III

ANALISIS PERAN PEMERINTAH INDIA DALAM MENGATASI PERIOD POVERTY DI INDIA

3.1 Period Poverty dan Ketidaksetaraan Gender di India

Ditinjau berdasar luas wilayah negaranya, India tergolong negara dengan wilayah yang luas. Tercatat luasnya sejumlah 3.287.263 km² dengan kepadatan berada di bawah Tiongkok. Sebagian besar penduduknya memeluk agama Hindu dengan persentase 83%, berbeda jauh dengan jumlah pemeluk Islam sebagai agama mayoritas kedua sebanyak 12%, dan sisanya merupakan gabungan dari agama Siktis, Kristen, dan sebagainya. Perekonomian India bertumpu pada dua sektor penting, pertanian dan peternakan. Sektor lain yang juga mendukung ialah perfilman. Industrinya terbilang besar di Asia, sehingga bisa dijadikan media sebagai pengembangan budaya lokal sekaligus media promosi ke dunia. Letak negara ini termasuk dalam wilayah Asia Selatan, mempunyai kekayaan yang besar pada aspek budaya yang hampir menyamai Tiongkok dalam sejumlah aspek kebudayaan, termasuk seni, arsitektur, juga kesusastraan. Akan tetapi, kekayaan serta keberagaman budaya yang dipunyai India tidak mampu mendongkrak perkembangan ekonomi negaranya. Masalah paling mencolok yang bisa ditemukan ialah kesenjangan sosial di bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Fenomena ini terjadi sebab adanya pengaruh dari India yang dijajah selama 150 tahun oleh Inggris, dan menyatakan kemerdekaannya di tahun 1947 (Tanaka 2018).

Untuk pembahasan kali ini *gender equality* atau kesetaraan gender mengarah pada sebuah kondisi yang setara untuk perempuan dan laki-laki dalam

memenuhi kewajiban dan haknya. Sampai saat ini diskriminasi berdasar gender masih sangat banyak terjadi. Diskriminasi yang terjadi di berbagai tempat memiliki tingkat dan sifat yang tidak sama, namun seringkali perempuan lah “korban” pada diskriminasi gender. Sebagian perempuan tidak menyepakati sistem yang berlaku terkait kesetaraan gender saat ini, terlebih pada stigma masyarakat yang menilai perempuan itu lemah. Pernyataan tersebut tidak bisa diterima banyak perempuan sebab akan memunculkan konteks ofensif. Stigma buruk tersebut tidak sepatasnya diterima oleh semua perempuan di dunia. Perempuan di India mewujudkan rasa tidak terimanya dengan menjalankan aksi yang diikuti oleh jutaan perempuan. Aksi mereka dilakukan pada hari pertama 2019 di sepanjang jalan raya, ditambah dengan mengirimkan aspirasinya dalam bentuk surat tentang kesetaraan gender. Durasi dari pelaksanaan unjuk rasa ini berjalan selama 15 menit, pemicunya ialah terbitnya larangan bagi perempuan untuk mengunjungi kuil Sabarimala yang terkenal di Kerala. Perempuan yang termasuk dalam usia menstruasi tidak diperbolehkan datang ke kuil tersebut. Akhirnya, larangan tersebut dibatalkan oleh pengadilan tinggi India (Wirawan 2019).

Selain itu, pada film dokumenter yang ditayangkan oleh Netflix berjudul “*Period, End of Sentence*”, menyoroti distrik Hapur sebagai salah satu daerah di India yang para perempuannya mengalami *period poverty* dan harus menghadapi stigma buruk dan perilaku yang tidak menyenangkan tiap mereka harus bersosialisasi di masyarakat atau sekolah. Berjarak sekitar 60 KM dari kota Delhi dan berbatasan dengan Nepal membuat distrik ini menjadi wilayah terluar dan

memiliki akses yang sulit kepada produk sanitasi menstruasi yang memadai dan higienis. Selain itu, faktor ekonomi dan kurangnya pendidikan juga menjadi faktor lainnya.

Meskipun konstitusi India memberikan hak istimewa bagi perempuan dan laki-laki serta memberikan ketentuan yang sama untuk meningkatkan reputasi anak perempuan di masyarakat, sebagian besar perempuan masih belum dapat menikmati hak dan peluang yang diberikan kepada mereka. Terlepas dari kenyataan bahwa konstitusi India menawarkan hak dan keuntungan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dan melakukan pengadaan paralel untuk meningkatkan reputasi anak perempuan dalam jaringan sosial, namun hak dan peluang tersebut dijamin bagi anak perempuan melalui konstitusi, masih agak jauh untuk menikmati manfaat itu. Pola pikir anti perempuan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat memaksa masyarakat perempuan untuk terjerumus ke dalam mesin biaya tradisional karena terlalu banyak kewajiban rumah tangga akan mengurangi peluang mereka untuk berkembang. Di era saat ini, beberapa faktor lain seperti tingkat melek huruf yang rendah, pengangguran, kemiskinan di kalangan perempuan adalah hal yang lumrah di India karena kesenjangan gender dalam masyarakat (V, Raju, 2020).

Menurut laporan *Key Highlights of the Global Gender Gap Report 2023*, India telah mencapai peringkat keseluruhan 127 dari 146 negara pada laporan edisi 2023. India telah menutup 64,3% kesenjangan gender secara keseluruhan. Namun, negara ini hanya mencapai paritas 36,7% dalam partisipasi dan peluang ekonomi.

3.1.1 Ketidaksetaraan Gender sebagai Akar dari *Period Poverty* di India

Salah satu alasan utama masih adanya pantangan dan pengelolaan kebersihan menstruasi yang diabaikan adalah ketidaksetaraan gender. Ketidaksetaraan hak mengakibatkan suara perempuan diabaikan rumah tangga dan masyarakat serta dalam program pembangunan (Khurana & Kaur, 2018). Alasan lain untuk hal yang sama adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran di kalangan perempuan. Banyak gadis pra-puber yang tidak menerima informasi tentang menstruasi dan tidak mengetahui teknik pembuangan produk sanitasi yang benar (Mitra, 2015). Hal ini mengakibatkan perempuan dan anak perempuan tidak diberi akses terhadap fasilitas dasar paling membutuhkannya.

Alasan utama konstruksi sosial masyarakat patriarki terhadap menstruasi adalah karena stigma negatif mengenai menstruasi sudah mengakar di benak masyarakat, khususnya di pedesaan. Hal ini mengakibatkan munculnya tabu dan mitos yang membatasi perempuan dari akses layanan kebersihan menstruasi. Tidak diizinkan menyentuh hewan, makanan yang akan dimakan orang lain, pengucilan dari ritual keagamaan, rumah keluarga dan fasilitas sanitasi, adalah beberapa contoh tabu yang masih lazim di banyak wilayah negara, salah satunya di India.

Period poverty bukan sekedar pelanggaran terhadap janji-janji konstitusi tetapi juga merupakan suatu hal yang mendesak masalah hak asasi manusia. Masalah ini bersinggungan dengan Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan PBB 4, 5, dan 6 memastikan pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, serta air bersih dan sanitasi. Beberapa instrumen internasional mewajibkan negara untuk menjamin akses terhadap kebutuhan fasilitas dasar ini. Seluruh kerangka Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 mengatur hal ini kesetaraan, martabat dan non-diskriminasi. Pasal 12 Kovenan Internasional tentang Ekonomi, Hak Sosial dan Budaya (ICESCR) menjamin standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai oleh semua orang (Khurana & Kaur, 2018).

Para perempuan yang mengalami *period poverty* di India adalah para perempuan yang juga mengalami diskriminasi dan terasingkan dari kehidupan sosial mereka. Dengan berbagai hambatan mulai dari ekonomi, sosial budaya, dan juga pendidikan. Para perempuan di India juga menanggung stigma buruk dari masyarakat atas hal biologis yang lumrah terjadi kepada mereka. Hambatan dan juga hak-hak yang tidak mereka dapatkan karena mengalami menstruasi secara jangka panjang juga akan mempengaruhi kehidupan mereka dan juga pembangunan berkelanjutan di India. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah dan kerjasama masyarakat dalam menekan angka *period poverty* dan juga ketidaksetaraan gender di India

3.2 Teori Feminisme Liberal Klasik dalam Memandang Period Poverty di India

Teori Feminisme Liberal Klasik memandang adanya isu *period poverty* di India sebagai isu dalam kelas dan gender di masyarakat. *Period Poverty* di India

sendiri merupakan permasalahan gender yang muncul karena sulitnya akses perempuan kepada pendidikan serta kurangnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam ekonomi dan masyarakat, sehingga tidak memungkinkan mereka untuk mendapatkan layanan yang mereka perlukan selama mengalami menstruasi. Dari pandangan teori ini, isu *period poverty* merupakan akibat dari adanya sistem patriarki yang membuat hidup perempuan cenderung dipengaruhi oleh kekuatan laki-laki. Perempuan India cenderung diharuskan dan ditekan untuk mengikuti norma budaya yang membuat mereka menjadi terbatas dalam memenuhi kebutuhan mereka, termasuk kebutuhan sanitasi menstruasi. Feminisme liberal klasik sendiri mendukung perempuan untuk mengelola hak-hak individu mereka seperti kebutuhan tubuhnya sendiri, termasuk mengenai kepentingan pengelolaan menstruasi. Teori ini juga menganggap bahwa pemerintah memiliki peran yang cukup signifikan sebagai aktor penting untuk menerbitkan kebijakan terkait peningkatan akses perempuan kepada produk sanitasi menstruasi, serta kebijakan mengenai akses perempuan kepada fasilitas untuk menunjang dan menangani diskriminasi perempuan dalam berbagai sektor penting seperti pendidikan, ekonomi, politik, dan juga sosial-budaya.

3.3 Peran dan Program Pemerintah India dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan

Melalui Program-program ini diantaranya adalah *Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram Councelling, Jan Ausadhi Suvidha Sanitary Napkins,*

National Rural Health Mission, program edukasi di sekolah oleh tim medis *Rashtriya bal Swasthya Karyakram*, program kontrol anemia untuk remaja perempuan. Selain itu, untuk memberikan perlindungan kepada hak-hak perempuan dalam mengakses pendidikan, ekonomi, dan juga berpartisipasi dalam masyarakat serta untuk menyediakan lingkungan yang mendukung kesetaraan gender pemerintah India juga menjalankan kerjasama bersama *UN Women* untuk mengatasi kekerasan dan diskriminasi seksual, memberikan akses pendidikan, ekonomi, politik, dan juga sosial-budaya melakukan pengesahan komite dan amandemen hukum pidana terkait kekerasan seksual serta turut menjalankan konvensi CEDAW (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*).

3.3.1 Program Pemerintah India untuk Mengatasi Poverty di India

Pemerintah India telah menjalankan beberapa program terkait pengadaan dan juga distribusi produk-produk sanitasi menstruasi seperti pembalut bersubsidi dan juga edukasi mengenai pengelolaan menstruasi pada remaja perempuan, terutama remaja perempuan di pedesaan dan daerah terpencil. Program tersebut diantaranya adalah.

1. Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram Counselling

Program ini merupakan program yang bertujuan untuk mengadakan konseling dan juga memberikan edukasi seputar kesehatan reproduksi bagi remaja perempuan dan juga pengadaan pembalut gratis beberapa

sekolah di daerah Odisha, andhra Paresh, Chhattisharh, Maharashtra, dan Kerala (Saputra, Candra, and Ariestuti, 2024)

2. *Jan Ausadhi Suidha Sanitary Napkins*

Di bawah Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana (PMBJP), Pemerintah telah meluncurkan Pembalut *Jan Aushadhi Suidha* dengan harga Rs. 1/- per pembalut untuk wanita untuk menjamin kemudahan ketersediaan layanan kesehatan menstruasi dengan harga terjangkau. Pembalut ini dijual melalui lebih dari 10.000 *Jan Aushadhi Kendra*, yang dibuka di seluruh negeri. Pembalut Suidha dijual dengan harga bersubsidi tinggi sebesar Rs. 1/- per pad dari lebih dari 10.000 *Jan Aushadhi Kendra*. Pembalut *Suidha* sangat terjangkau & tersedia di semua *Jan Aushadhi Kendra* di seluruh negeri dengan harga Rs. 1/- per bantalan.

Biro Farmasi & Alat Kesehatan India (PMBI), lembaga pelaksana skema ini, melakukan kampanye publisitas dan kesadaran untuk Pembalut Suidha ini melalui media sosial dan media publisitas lainnya untuk mempromosikan perilaku higienis di kalangan perempuan (Ministry of Chemicals and Fertilizers, 2023).

Pembalut wanita ini bersifat ramah lingkungan karena pembalut ini terbuat dari bahan Oxo-biodegradable yang memenuhi standar ASTM D-6954 (uji biodegradabilitas). (Ministry of Chemicals and Fertilizers, 2020).

3. *National Rural Health Mission*

The National Health Mission (NHM) mencakup dua Sub-Misi, *The National Rural Health Mission* (NRHM) dan *The National Urban Health Mission* (NUHM). Komponen program utama meliputi Penguatan Sistem Kesehatan, Kesehatan Reproduksi-Maternal-Neonatal-Anak dan Remaja (RMNCH+A), serta Penyakit Menular dan Tidak Menular.

Program ini merupakan program dari Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga yang salah satunya berfokus untuk memperkenalkan program promosi menstruasi kebersihan bernama Skema Kesehatan Menstruasi yang menyoar remaja perempuan pada kelompok usia 10-19 tahun, bertempat tinggal di pedesaan, untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan informasi yang memadai tentang penggunaan pembalut wanita, bahwa produk-produk aman berkualitas tinggi tersedia bagi mereka, dan bahwa mekanisme pembuangan limbah yang aman bagi lingkungan dapat diakses dengan mudah (Government of India, 2020).

4. *Program Edukasi oleh Tim Medis Rashtirya bal Swasthya Karyakram*
Memiliki fokus untuk menyebarkan edukasi kesehatan bagi anak laki-laki maupun perempuan di berbagai sekolah di India.

5. *Program Kontrol Anemia*

Memiliki fokus untuk memberikan edukasi mengenai kecukupan zat besi dan nutrisi bagi remaja perempuan.

3.3.2 Program Pemerintah India untuk kesetaraan gender dalam aspek politik, ekonomi, pendidikan, dan sosial-budaya di India

1. Kerjasama dengan *UN Women*

UN Women bekerja dengan perwakilan perempuan terpilih dan membantu mendidik mereka tentang hak-hak mereka, sehingga mereka dapat mempengaruhi keadilan dan layanan publik. Dengan dana dari Pemerintah Norwegia, *UN Women's Gender Responsive Governance Programme* mempromosikan kepemimpinan politik dan pemerintahan perempuan di India, Bhutan, Maldives dan Sri Lanka. Saat ini, program ini berjalan di lima negara bagian dan 16 distrik di India, yaitu Madhya Pradesh, Odisha, Andhra Pradesh, Rajasthan dan Karnataka (*UN Women*, n.d.). Selain itu pemerintah India dan *UN Women* juga bekerjasama dalam pemberdayaan ekonomi perempuan, pencegahan kekerasan seksual, keamanan perempuan, dan migrasi.

2. Pengesahan Komite Hukum Pidana

Dalam Hukum Pidana (amandemen) ditegaskan bahwa tindakan pemerkosaan dalam bentuk apapun merupakan bentuk serangan seksual. Aktivitas seksual apapun dengan siapapun yang berusia di bawah 18 tahun, tanpa adanya persetujuan merupakan pemerkosaan menurut undang-undang.

3. Pengaplikasian Konvensi CEDAW

Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) merupakan sebuah kesepakatan hak asasi

internasional yang secara khusus mengatur hak kaum perempuan. Konvensi ini mendefinisikan prinsip tentang hak-hak manusia, norma-norma, dan sebuah standar kelakuan serta kewajiban yang negara peserta konvensi harus penuhi. Konvensi CEDAW juga bertindak mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. CEDAW juga memungkinkan setiap individu atau kelompok yang merasa tidak puas atas pelaksanaan CEDAW di negaranya untuk mengajukan langsung permasalahannya kepada pemerintah sampai PBB. Konvensi ini juga menyatakan bahwa diskriminasi terhadap perempuan tidak hanya terjadi pada situasi yang normal tetapi juga terjadi pada saat situasi khusus, seperti kemiskinan. Pada situasi kemiskinan, diskriminasi terhadap kaum perempuan menyebabkan perempuan menduduki posisi yang paling kurang memiliki akses terhadap masalah pangan, kesehatan, pendidikan, pelatihan, dan kesempatan dalam lapangan pekerjaan atau kebutuhan lainnya (Harper 2009).

3.4 Teori Feminisme Liberal Klasik dalam Memandang Peran Pemerintah India

Feminisme liberal menekankan persamaan hak dan kebebasan individu antara laki-laki dan perempuan dan meremehkan perbedaan gender. Feminisme liberal diterima secara luas sebagai salah satu filosofi sosial dan politik feminis yang paling populer. Feminis liberal membela keadilan gender dan menekankan

pentingnya peran sosial, keluarga, dan seksual dengan cara yang mendorong pemenuhan diri perempuan (Mukul, 2022).

Di India, gerakan feminisme berkembang pesat di zaman modern. Untuk memahami dan berempati terhadap respon feminis, penting untuk dicatat bahwa feminis India menampilkan rangkaian gambaran yang sangat berbeda. Penderitaan perempuan yang panjang dan menyakitkan, perjuangan berat untuk menghilangkan gagasan kesetaraan upah untuk pekerjaan yang setara, perjuangan berkelanjutan untuk hak aborsi perempuan, dan praktik kontrasepsi adalah beberapa tanda jelas dari ketidaksetaraan gender yang terus berlanjut. bahwa perempuan harus berjuang. Situasi feminis di India mempunyai periode yang berbeda-beda. Masyarakat India selalu bersifat hierarkis. Berbagai hierarki dalam keluarga yang menentukan usia, jenis kelamin, dan status, serta dalam masyarakat dalam kaitannya dengan kasta sosial, pendidikan, pekerjaan, dan hubungan dengan kekuasaan yang berkuasa, dijaga dengan sangat ketat (Mukul, 2022).

Salah satu cara untuk mengkarakterisasi kesalahan yang terjadi ketika negara gagal mengakui hak-hak perempuan adalah dengan tidak menghormati hak perempuan untuk diperlakukan setara dengan laki laki, atau hak atas perlakuan yang sama di mata hukum. Yang pasti, para feminis klasik-liberal berpendapat bahwa hukum tidak boleh memperlakukan perempuan dan laki-laki secara berbeda. Namun hal ini terjadi karena mereka yakin setiap orang punya hak yang sama. Hal ini jelas ketika kita melihat bahwa, bagi feminisme liberal klasik, perlakuan setara di bawah hukum yang tidak adil bukanlah keadilan (McElroy 1991a: 3).

Akar teori ini bertumpu pada kebebasan dan kesetaraan rasionalitas. Perempuan adalah makhluk rasional, kemampuannya sama dengan laki-laki, sehingga harus diberi hak yang sama juga dengan laki-laki. Permasalahannya terletak pada produk kebijakan negara yang bias gender. Oleh karena itu, pada abad 18 sering muncul tuntutan agar perempuan mendapat pendidikan yang sama, di abad 19 banyak upaya memperjuangkan kesempatan hak sipil dan ekonomi bagi perempuan, dan di abad 20 organisasi-organisasi perempuan mulai dibentuk untuk menentang diskriminasi seksual di bidang politik, sosial, ekonomi, maupun personal (Retnani, 2017). Feminisme liberal klasik menilai bahwa negara memiliki peran penting dalam menyediakan kesetaraan gender dalam berbagai aspek penting kehidupan manusia seperti aspek ekonomi, pendidikan, politik, dan juga kehidupan sosial budaya. Teori ini memiliki pandangan bahwa negara seringkali bersifat “maskulin” dan didominasi oleh laki-laki. Perempuan cenderung tidak dapat berpartisipasi sebagai warga negara dimana hak-hak mereka juga tidak sepenuhnya dipenuhi. Teori ini berfokus kepada hak-hak, kesempatan, dan kebebasan bagi perempuan sebagai individu yang harus memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki.

Dengan adanya berbagai program yang dijalankan oleh pemerintah India baik melalui departemen atau kementerian dalam negeri terkait maupun kerjasama dengan organisasi internasional seperti *UN Women* merupakan bentuk perwujudan negara sebagai pelindung hak-hak perempuan dalam menciptakan kondisi negara yang mendukung kesetaraan gender. Selain itu, pemerintah India juga melakukan berbagai cara untuk melindungi hak-hak perempuan di India, dengan didukung

oleh organisasi Internasional dan aktivis-aktivis pejuang hak-hak perempuan di India dengan berlandaskan perspektif feminisme liberal klasik. Dimana teori ini juga menekankan bahwa perempuan juga dapat bersifat rasional seperti laki-laki dan memiliki potensi yang sama besarnya apabila diberikan kesempatan dan akses kepada ekonomi, politik, pendidikan, dan juga masyarakat.

Pemerintah India sendiri sudah memenuhi standar dari perspektif feminisme liberal klasik dalam mengatasi *period poverty* dan ketidaksetaraan gender. Dimana program meliputi penerbitan kebijakan dan program yang membantu mengurangi tingkat kesulitan perempuan dalam mengakses produk dan fasilitas sanitasi untuk menstruasi seperti program *Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram Councelling*, *Jan Ausadhi Suvudha Sanitary Napkins*, *National Rural Health Mission*, program edukasi di sekolah oleh tim medis *Rashtirya bal Swasthya Karyakram*, program kontrol anemia untuk remaja perempuan.

Selain itu, guna menunjang kehidupan perempuan dan meningkatkan kualitas hidup mereka dalam menghindari peningkatan *period poverty*, teori ini juga mendukung peran pemerintah sebagai aktor yang dapat mengurangi diskriminasi dengan melindungi hak-hak perempuan tanpa mengesampingkan hak-hak individu mereka. Dimana hal ini juga sesuai dengan deklarasi India di CEDAW, bahwa mereka tidak akan turut campur tangan ke dalam hal-hal yang bersifat individu atau pribadi, baik dalam masyarakat maupun budaya tradisional. Hal-hal pribadi menurut *The Constitutional of India* termasuk dalam permasalahan pernikahan, pembagian hak waris, dan juga pengadopsian. Pemerintah India juga telah memenuhi standar dari teori ini dimana diterbitkannya program kerjasama

bersama *UN Women* untuk mengatasi kekerasan dan diskriminasi seksual, memberikan akses pendidikan, ekonomi, politik, dan juga sosial-budaya melakukan pengesahan komite dan amandemen hukum pidana terkait kekerasan seksual serta turut menjalankan konvensi CEDAW (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*).

Dengan adanya beberapa kebijakan dan program kerjasama pemerintah India dengan organisasi internasional serta departemen dan kementerian terkait dalam melindungi hak-hak perempuan, mengatasi period poverty, serta usaha untuk menghilangkan stigma di masyarakat tentunya hal ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh teori feminisme liberal klasik dalam mengatasi period poverty dan juga ketidaksetaraan gender yang saling berkaitan di India. Namun tentunya usaha pemerintah India ini juga memiliki tantangan berupa budaya dan tradisi yang turun-temurun membuat budaya patriarki mengakar dalam masyarakat dan sulit untuk dihilangkan. Selain itu, tingkat populasi yang tinggi di India membuat tingkat kejahatan dan kemiskinan juga melonjak naik dan membuat perempuan menjadi tidak aman, kurangnya instrumen hukum seperti aparat dan lembaga hukum yang berwenang juga menjadi permasalahan yang membuat masyarakat menjadi tidak percaya sepenuhnya kepada pemerintah.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data pada bab III dapat diambil kesimpulan bahwa peran pemerintah India melalui kebijakan dan program kerjasama pemerintah India dengan organisasi internasional serta departemen dan kementerian terkait dalam melindungi hak-hak perempuan, mengatasi *period poverty*, serta usaha untuk menghilangkan stigma di masyarakat memiliki peran penting dalam penanganan manajemen kebersihan menstruasi dan ketidaksetaraan gender di India. Dengan adanya sarana fasilitas yang terjangkau oleh semua kalangan dan edukasi kepada para perempuan yang mengalami menstruasi membuka jalan untuk menghilangkan stigma negatif dan juga anggapan bahwa menstruasi adalah hal yang tabu untuk dibahas. Selain itu, kedua program ini juga meningkatkan inovasi dan kualitas hidup para perempuan tanpa harus membuat mereka mengorbankan kesehatan dan perekonomian mereka dalam memenuhi kebutuhan sistem reproduksi mereka. Program ini telah memenuhi standar yang diterapkan oleh teori feminisme liberal klasik dalam mengatasi ketidaksetaraan gender, untuk melindungi hak-hak perempuan tanpa mengacuhkan hak-hak pribadi mereka serta menyediakan kondisi yang mendukung kesetaraan gender.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang tertera, tentunya penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dan belum sempurna. Penelitian ini masih terbatas pada program pemerintah India. Akan lebih jelas dan menarik apabila menganalisis bagaimana peran-peran organisasi non-pemerintah dalam menanggapi dan menangani permasalahan gender dan isu *period poverty* di India. Penelitian selanjutnya juga dapat menganalisis kelanjutan program-program tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan serta kebebasan hak-hak hidup perempuan di

DAFTAR PUSTAKA

- Bartlett, K. (2017). Feminism and Economic Inequality. *Law and Inequality*, 35(2), 265.
- Batar, S. (2021). Gender inequality in india: an overview. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(12), 458–464. <https://doi.org/10.5958/2249-7137.2021.02648.3>
- Bisht, N., & Pattanaik, F. (2021). Exploring the magnitude of inclusion of Indian youth in the world of work based on choices of educational attainment. *Journal of Economics and Development*, 23(2), 128–143. <https://doi.org/10.1108/jed-08-2020-0114>
- Chen, Guangzhe. (2022). "Gender-smart infrastructure improves gender equality in South Asia." *World Bank Blogs*.
- Dr. Ramesh H. Patil. (2021). Social Status of Indian Women of Different Periods in the Patriarchal Society. *Research Ambition: An International Multidisciplinary e-Journal*, 5(IV), 23–31. <https://doi.org/10.53724/ambition/v5n4.06>
- Fitriani, N., Qomariyah, U., & Sumartini, S. (2019). Citra Perempuan Jawa Dalam Novel Hati Sinden Karya Dwi Rahyuningsih: Kajian Feminisme Liberal. *Jurnal Sastra Indonesia*, 7(1), 62–72. <https://doi.org/10.15294/jsi.v7i1.29818>
- Ghosh, M. K. S. & A. (2009). *Culture Society and Development in India*.

- Harper, E. (2009). International Law and Standars Applicable in Natural Disaster Situation. Italia: International Development Law Organization, pp. 122-123.
- Judul, H., Anuttami, L. C., Islam, U., Sunan, N., Surabaya, A., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., Studi, P., & Internasional, H. (2021). *PERAN THE PAD PROJECT DALAM MANAJEMEN Oleh :*
- Kaur, R., Kaur, K., & Kaur, R. (2018). Menstrual Hygiene, Management, and Waste Disposal: Practices and Challenges Faced by Girls/Women of Developing Countries. *Journal of Environmental and Public Health*, 2018. <https://doi.org/10.1155/2018/1730964>
- Mariscal, J., Mayne, G., Aneja, U., & Sorgner, A. (2019). Bridging the gender digital gap. *Economics*, 13, 1–12. <https://doi.org/10.5018/economics-ejournal.ja.2019-9>
- Mitra, S. (2022). *Major dimension of inequalities in India: Gender*. 1–8. www.mospi.nic.in
- Mustafa, F., Sohi, & J. S. S., Mustafa, F., & Sohi, J. S. (2017). Freedom of religion in india: current issues and supreme court acting as clergy. *Brigham Young University Law Review*, 2017(4), 2017. <https://heinonline.org/HOL/License>
- Narang, T. (2022). Addressing period poverty can boost India’s GDP by 2.7%: insights, implications & initiatives. *International Journal of Applied Research*, 8(9), 28–35. <https://doi.org/10.22271/allresearch.2022.v8.i9a.10119>

- Noviyanti. (2021). "Peran Un Women dan Pemerintah India dalam Mengatasi Kekerasan Seksual di India Periode 2015-2017."
- Pleaders. (2022). "Liberal Feminism."
- Priti Jha, & Niti Nagar. (2015). A Study of Gender Inequality in India. *International Journal of Indian Psychology*, 2(3). <https://doi.org/10.25215/0203.045>
- Rohatgi Aishwarya & Sambit Dash. (2023). "Period Poverty and Mental Health of Menstruators during COVID-19 Pandemic: Lessons and Implications for the Future". <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36937043/>
- Sah, S. (2022). *Patriarchy and the Identity of Women in Indian Society*. 9(8), 596–603. www.jetir.org
- Sarabu, V. K. (2022). *Gender Gap -Special Reference To India*. January.
- Singh, A. P., Llb, B. A., & Ambedkar, B. R. (n.d.). *WHAT DOES THE CONSTITUTION OF INDIA SAY ABOUT GENDER*. 6, 112–117.
- Srinivasan, D., & Kannan, B. (2021). Establishing the Unconstitutionality of Menstrual Exclusion Practices in India. *Columbia Journal of Gender and Law*, 41(1), 198–207. <https://doi.org/10.52214/cjgl.v41i1.8837>
- Srivastava, D., Kumari, A., & Prasad Lal, S. (2022). Factors Influencing Adoption of Climate-Friendly Oxo-Biodegradable Jan Ausadhi Suvidha Sanitary Napkins among Women in India. *International Journal of Environment and Climate Change*, 12, 1754–1760. <https://doi.org/10.9734/ijecc/2022/v12i121622>

- Tedjo, A. K., Ramadhan, M. D., Dirgantara, M. D., & Bahari, R. A. M. (2021). Tantangan Budaya dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender di India dan Solusinya. *Jurnal Hubungan Internasional*, 14(1), 142. <https://doi.org/10.20473/jhi.v14i1.13310>
- Thakur, D. (2019). *Gender Equality and Human Rights in India: Issues and Perspectives*. III(I), 269–275. <https://www.gapjournals.org/>
- Thakuri, D. S., Thapa, R. K., Singh, S., Khanal, G. N., & Khatri, R. B. (2021). A harmful religio-cultural practice (Chhaupadi) during menstruation among adolescent girls in Nepal: Prevalence and policies for eradication. *PLoS ONE*, 16(9 September), 1–22. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0256968>
- Tripathi, N., & Kumar, A. (2022). The Constitutional Struggle for Religious Freedom: A Comparative Study of India and Indonesia. *Constitutional Review*, 8(1), 1–36. <https://doi.org/10.31078/consrev811>
- Toybox. (2021). "Spotlight on Period Poverty in India."
- Women, UN. n.d. "Leadership and Participation." *UN Women Asia and Pacific*
- Worby, C., & Margolis, B. (2000). Positive versus negative signaling of LET-23: regulation through the adaptor protein, SEM-5. *Science's STKE: Signal Transduction Knowledge Environment*, 2000(63). <https://doi.org/10.1126/scisignal.632000pe2>